

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana sektor pertanian memegang peranan yang sangat penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menggantungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar artinya bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sector pertanian. Pendapatan yang diterima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani (Irmayanti, 2010).

Salah satu masalah yang paling berat dan kompleks yang dihadapi Indonesia adalah masalah lahan. Salah satunya dari masalah perlahanan adalah menyangkut status penguasaan lahan yang mengkaitkan banyak petani. Status penguasaan lahan pada pokoknya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pemilik penggarap (owner operator), penyewa (cash tenant) dan penyakap atau bagi hasil (share tenant). Status penguasaan lahan yang berbeda secara teoritis akan menentukan tingkat keragaman usahatani yang berbeda pula. Secara teoritis kedudukan petani penyakap palinglah lemah sehingga akan berpengaruh terhadap keragaan usahatani, tetapi secara faktual tidaklah tentu demikian yang disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu diteliti lebih lanjut (Mudakir, 2011).

Sebagai salah satu wilayah penghasil Jagung terbesar di Indonesia Provinsi Gorontalo memiliki sumber daya alam pertanian yang cukup luas, hal ini dibuktikan dari beberapa daerah yang ada di Provinsi Gorontalo memiliki luas lahan pertanian yang menopang perkembangan pertumbuhan ekonomi penduduk di masing -masing daerah. Data BPS Kabupaten Boalemo Tahun 2013 mencapai 35.823hektar, dengan jumlah produksi 163.400 kemudian 42.251 hektar pada tahun 2014 dengan jumlah

produksi 192.540, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 29.282 hektar dengan jumlah produksi 121.655, kemudian menurun lagi tahun 2016 menjadi 28.554 hektar dengan jumlah produksi yang belum diketahui, dan yang terakhir pada tahun 2017 luas panen jagung sangat meningkat yaitu 73.518 hektar dengan jumlah produksi yang belum diketahui. Kabupaten Boalemo merupakan Kabupaten yang luas panennya meningkat pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman jagung merupakan tanaman yang cukup banyak diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Boalemo. Produksi jagung di kabupaten Boalemo cukup besar, dilihat dari luas panen jagung yang tinggi. (BPS Provinsi Gorontalo 2013-2017)

Kecamatan Botumoito merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu sebesar 479,95Km² atau 26,24% dari luas Kabupaten Boalemo secara keseluruhan. Menunjukkan penghasilan utama masyarakat di Kecamatan Botumoito hampir semua atau di dominasi oleh mata pencaharian bertani dan khusus untuk wilayah di jumpai petani lebih banyak menggarap lahan kering atau agroekosistem di lokasi ini di dominasi oleh pertanian lahan kering. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya adalah sebagai bercocok tanam tahunan seperti Kelapa, Kakao, dan tanaman buah buhan lainnya seperti mangga dan langsung. Demikian juga untuk tanaman musiman dapat dijumpai tanaman jagung dan tanaman hortikultura lainnya namun lebih didominasi oleh tanaman jagung yang merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan telah di adopsi oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo selain Program unggulan daerah Boalemo yaitu tanaman Kakao. Sektor pertanian di wilayah ini masih mendominasi aktivitas keseharian. Masyarakat, dijumpai bahwa kegiatan pertanian di lahan kering masih mendominasi kegiatan pertanian di wilayah ini. Jumlah rata-rata Produksi dan luas panen terbesar di Kecamatan Botumoito adalah tanaman jagung dengan luas panen 1,725 ha dengan jumlah produksi 8,592,40 ton

Desa Potanga merupakan salah satu desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian khususnya jagung dan salah satu desa yang potensial

penghasil jagung. Pengelolaan usahatani Jagung oleh petani di Desa Potanga terdapat tiga kategori yaitu pemilik, penggarap dan penyewa . umumnya petani jagung di Desa ini berstatus sebagai penggarap. Selama ini pengelolaan usahatani oleh petani penggarap khususnya di Desa Potanga belum diketahui, sehingga diperlukan suatu kajian terutama dari sisi pendapatannya dan pembagian hasilnya.

Umumnya petani penggarap di Desa Potanga kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo mendapat $\frac{1}{3}$ dari tiga bagian dari hasil yang diperoleh dengan ketentuan bagi pemilik lahan, petani penggarap dan operasional usahatani seperti pembelian pupuk, upah kerja biaya tanam dan panen. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah dalam sistem pembagian tersebut hasil usahatani pada setiap musim panen relatif berbeda yang disebabkan oleh factor iklim. Hal ini berdampak pada jumlah produksi jagung. Adanya perubahan tersebut maka keuntungan petani ikut berubah, semakin kecil jumlah produksi jagung maka semakin sedikit keuntungan petani khususnya petani penggarap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Bagi hasil yang diperoleh Petani Penggarap pada Usahatani Jagung di Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo?
2. Berapa tingkat pendapatan petani Penggarap Usahatani jagung di Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui Sistem Bagi hasil yang diperoleh Petani Penggarap pada Usahatani Jagung di Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo

2. Mengetahui tingkat pendapatan petani Penggarap Usahatani jagung di Desa Potanga Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis tentang bagaimana pendapatan petani penggarap usahatani jagung.
2. Sebagai bahan referensi di bidang pendidikan, guna pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
3. Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi penyempurnaan kebijakan lanjutan di wilayah tersebut dan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan sejenis di wilayah lain.